

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- E.Y. Kanter dan S.R, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta.
- I Ketut Mertha, *et.al*, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Imran Ali dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, Tangerang.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- King Faisal Sulaiman. 2017. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung.
- Laden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.

- M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch Chairul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2021, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri.
- Moeljatno, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Moeljatno. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ohoitmur, Yong. 1997. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press, Jakarta.
- Sofyan Andi, Nur Azisa. 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara PjhxDerdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syarif Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

B. Jurnal

Abdul Rahman Upara,"Penerapan Sanksi Pidana Adat Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana

Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati” Jurnal Legal Pluralism, Volume 4 Nomor 2, Juli 2014

Asrianto Zainal “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Indonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana”, Jurnal Al-‘Adl Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1, Januari 2016

Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7, Nomor 1, Maret 2018, hlm.

Fernando Louis Pantow, “Hubungan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, Nomor 4, Juni 2018.

Frezcilia Dewi Daleda, “Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan”, Jurnal Lex Crimen, Vol. oo[-0000000000000000VI, Nomor 6, Agustus 2017.

Ronaldo Ipakit, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, Nomor 2, April 2015.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Fachmi, Muhammad Rafi and Milda Istiqomah,, S.H., MTCP., Ph.D. and Ardi Ferdian,, S.H., M.Kn. (2023) “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memaknai Frasa Antargolongan Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn Dps). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya” <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213798>. Diakses pada tanggal 01 Mei 2024

Syarif Saddam Rivanie Parawansa, “*Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*”, Disertasi, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.bgg

Mathorisa, Amorina Farhan And Deaf, Wahyuni Ramadhani (2022) “*Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps*”. Diploma Thesis, Universitas Bung Hatta.Www.Hukumonline.Com, Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai, diakses pada hari senin 16 maret 2024.

D. Artikel Website

- Prof. Dr. Ahmad M Ramli Guru Besar Cyber Law & Regulasi Digital UNPAD "Pasal Ujaran Kebencian UU ITE yang Dicabut dan Penggantinya di UU KUHP Baru", <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/13285951/pasal-ujaran-kebencian-uu-ite-yang-dicabut-dan-penggantinya-di-uu-kuhp-baru>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2024
- Aulia Anastasya Putri Permana, Shafarina Intan Khomsah. "Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE". <https://www.neliti.com/id/publications/495146/penafsiran-restriktif-atas-pasal-28-ayat-2-uu-ite>. 21 Maret 2024
- Bonasir, Bonasir and UI Hosnah, Asmak and Perdana, Angga (2024) *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XV/2017 Dalam Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Ujaran Kebencian Dalam Putusan Nomor 828/PID.SUS/2020/PN.DPS*. Skripsi thesis, Universitas Pakuan. <http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/8619>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Curup. "Bermedia Sosial dengan Bijak, Yuk sama – sama Fahami UU ITE". <https://www.pn-curup.go.id/artikel/artikel-bermedia-sosial-dengan-bijak-yuk-sama-sama-fahami-uu-ite>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2024
- Renata Christha Auli, S.H., "Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA". [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-\(2\)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/). Diakses pada tanggal 20 Mei 2024
- Sri Pujianti. "Pasal Penyebaran Kebencian Kepada Masyarakat Tertentu dalam UU ITE Dianggap 'Multitafsir'". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23021&menu=2>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024
- Tejogeo, "Masalah Sosial terkait SARA: Konflik Ambon", melalui <https://tejogeo.wordpress.com>, diakses Senin, 31 Oktober 2024, Pukul 15.00 wita.
- KBBI, "Pengertian Penyelidikan" <https://kbbi.lektur.id/penyelidikan>, Diakses pada tanggal 12 September 2022.
- Andrew, Teori Hukum Menurut Para Ahli, https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/?srsId=AfmBOoqGM3DOdz1C2cRDuuxowvY_sBcY_lfvgacF_YVWslsUrtJSyim-, diakses pada tanggal 8 Agustus 2025

Arif Maulana, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", 26 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya.html>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Heru Nugroho, Kepanjangan sara dan Pengertiannya, <https://www.merdeka.com>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

Fahri Fauzi Rasihan, Simak Pembagian Hukum Pidana Berikut Ini, <https://buku.kompas.com/read/2078/simak-pembagian-hukum-pidana-berikut-ini>, diakses pada tanggal 1 September 2024

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)